

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Invervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Edivis Rev). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aditya, R. (2020). Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan dan Asasnya, Lengkap! Retrieved 8 January 2021, from <https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asasnya-lengkap?page=all#:~:text=Asas Otonomi Daerah&text=Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23,%2C dekonsentrasi%2C dan tugas pembantuan.>
- Akbar, M. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(8).
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 551–566.
- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. (Krista,Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Bender, D. (2016). Desa, (1), 45–54. Retrieved from <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Blogger Desa. (2018). 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved 15 April 2021, from <https://risehtunong.blogspot.com/2018/05/5-siklus-pengelolaan-keuangan-desa.html>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2021). Profil Masyarakat. Retrieved 12 January 2021, from <http://portal.sidoarjokab.go.id/profil-masyarakat>
- Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, X(3), 17.
- Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(1), 23–40. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.849>
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hayati, R. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi*

*Bisnis*, 1(2), 449–462.

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Politik*, 10(1), 146–154.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- Indonesia, P. R. (2014). PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 14–24.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- KBBI. (2020a). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring. Retrieved 25 January 2020, from <https://kbbi.web.id/intervensi>
- KBBI. (2020b). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring. Retrieved 25 January 2021, from <https://kbbi.web.id/daerah>
- Kementerian Keuangan Learning Center. (2020). Siklus APBN. Retrieved 6 February 2021, from <https://klc.kemenkeu.go.id/bdkmks-siklus-apbn/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Buku Saku Dana Desa*.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227–429.
- Milles and Huberman. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Nababan, R. E., Amin, M., & Badaruddin. (2020). Village Fund Implementation in Supporting Infrastructure Development: A Case Study in Purba Manulu Village, Humbang Hasundutan Regency, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 251–258.
- Noak, P. A., & Erawan, K. P. (2019). Multikulturalisme Desa Di Bali Dalam Kontrol Negara: Implementasi Dana Desa Bagi Kegiatan Lintas Budaya Di

Badung Dan Buleleng. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 133–147.  
Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4808>

Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). *TELAAHAN ISU-ISU STRATEGIS DESENTRALISASI dan OTONOMI DAERAH. Lan Ri*.

Novianty, I., Setiawan, I., Afiyanti, F., Syarief, E., Gunawan, A., Sudrajat, & Djatmika, D. (2020). Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Snantias*, 1(1), 1583–1592.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penulis Seraficha Gischa, & Gischa, E. S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/08/190000169/peran-pemerintah-daerah-dalam-otonomi-daerah?page=all>

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Melalui Kampung Tangguh Di Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.-b).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *Conference of Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 186–194.
- Purbantara, A., & Mujiyanto. (2019). *Modul Pemberdayaan Masyarakat* (Cetakan Pertama).
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.
- Sandhi, H. K., & Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis*, 3(2), 2621–3982.
- Septiana, T. (2021). Pengertian APBN, Fungsi, Tujuan, Serta Penyusunannya. Retrieved 6 February 2021, from <https://lifestyle.kontan.co.id/news/pengertian-apbn-fungsi-tujuan-serta-penyusunannya>
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 25–35. Retrieved from <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23–32.
- Sugianto, O. (2020). Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan. Retrieved 24 January 2020, from <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/#:~:text=Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk,detail suatu data yang diteliti.&text=Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam penguk>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Syauqi. (2016). the Implications of the Act Number 23 of 2014 of the Republic. *Sosio Informa Vol.*, 2(1), 19–32.

Umbara, D., Kamaluddin, M., & Tawai, A. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–10. Retrieved from <https://doi.org/10.33772/publica.v10i1.6294>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 124–132.

Winarni, F., & Yunanjaya, P. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 49–64. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12614>